

**Analisis Kebijakan Mutu Akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja (LPK) Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
(Studi Kasus Di AMIKOM Palembang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian

Persyaratan Dalam Menempuh

Derajat Sarjana S-1 Ilmu

Administrasi Publik

Oleh:

Pasha Adelina Victorya Lumbantobing

NIM. 07011282126167



JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA 2025

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI
“Analisis Kebijakan Mutu Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan”
(Studi Kasus Di AMIKOM Palembang)

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Pasha Adelina Victorya Lumbantobing

NIM. 07011282126167

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

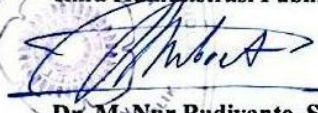
Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.SI

NIP. 197905012002121000



11/3/25

.

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN MUTU AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Oleh :

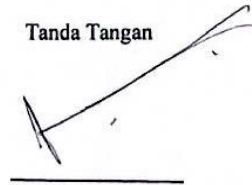
PASHA ADELINA VICTORYA LUMBANTOBING
NIM.070112821126167

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 24 Maret 2025

Pembimbing :

1. **Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si**
NIP. 197905012002121000

Tanda Tangan



Penguji :

1. **Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**
NIP. 196911101994011001

Tanda Tangan



2. **Lisa Mandasari, S.IP., M.Si**
NIP. 198603272023212029



Mengetahui,

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pasha Adelina Victorya Lumbantobing

NIM : 07011282126167

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Kebijakan Mutu Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Di AMIKOM Palembang)”** ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun

Yang membuat pernyataan

Indralaya, 11 Maret 2025



Pasha Adelina Victorya Lumbantobing

NIM. 07011282126167

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.” – Filipi 4:13

“Everything becomes a bad thing when you think negative. When you think positive, it become better.” – (KJ)

Decide for yourself what it means to be happy. Everyday, take a step to grow up. But sometimes, it's okay to show your weakness. It's okay to be yourself. So don't lie to yourself anymore. – (Lights)

As simple as, Let God Lead. –

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Orang Tua penulis, Ayah dan Ibu**
- 2. Saudara dan saudari Penulis**
- 3. Pegawai Disnakertrans dan AMIKOM**
- 4. Teman-teman penulis**
- 5. Semua dosen dan pegawai FISIP UNSRI**

Abstrak

Masalah pengangguran kerap menjadi masalah negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dapat diatasi dengan mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan mutu akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Amikom di Palembang yang berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan akreditasi, menelaah alternatif implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap peningkatan mutu pelatihan kerja. Fokus penelitian mencakup proses perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, monitoring kebijakan berdasarkan teori analisis kebijakan William Dunn. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan subjek terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam akreditasi LPK mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya keterjangkauan dukungan sosial dan politik, serta rendahnya efektivitas rekomendasi kebijakan yang telah diterapkan. Tetapi, dalam penerapan standar yang digunakan terbilang cukup baik.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Kebijakan Mutu, Akreditasi LPK



Abstract

This research aims to analyze the quality accreditation policy of the Amikom Vocational Training Institute in Palembang, guided by the Minister of Manpower Regulation Number 5 of 2022. This can be overcome by attending training at a vocational training centre (LPK). This research aims to identify issues in the implementation of accreditation, examine alternative policy implementations, and assess their impact on improving the quality of vocational training. The focus of the research includes the problem formulation process, forecasting, recommendations, and policy monitoring based on William Dunn's policy analysis theory. The research method used is qualitative with a case study approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with the relevant subjects. The research results indicate that the main obstacles in LPK accreditation include limited human resources, lack of accessibility to social and political support, and low effectiveness of the implemented policy recommendations. However, the implementation of the standards used is considered quite good.

Keywords: Policy Analysis, Quality Policy, Accreditation of the Amikom Vocational Training Institute.



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul Analisis Kebijakan Mutu Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Di AMIKOM Palembang). Proposal Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Proses pembuatan proposal skripsi ini, penulis sadar terdapat banyak sekali pihak yang terlibat untuk membantu penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini. Karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati dan mendengar keluhan dan doa penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
2. Orang tua penulis, Amang Patoman Lumbantobing dan Inang Tiurnita Br. Napitupulu yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bang Rio, Kak Febri, Kak Ivo, Bang Frandi, dan Kak Lia yang selalu membantu keuangan dan membantu keperluan penulis baik selama di perantauan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Adek Celine, Bang Patar yang ikut memberikan semangat.
5. Prof. Dr. Taufiq Marwa S.E., sebagai Rektor Universitas Sriwijaya.

6. Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
8. Dr. Andries Lionardo S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan saran kepada penulis dalam penulisan proposal skripsi ini.
9. Seluruh pengajar serta staff Fisip Unsri, atas bimbingan dan ilmu yang diberikan selama masa studi ini.
10. Sahabat dan teman-teman yang berkontribusi untuk menemani, mendukung, dan berbagi suka serta duka dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Almamater tercinta, tempat saya belajar, tumbuh, dan berkembang untuk meraih masa depan yang lebih baik

Berkat bantuan mereka semua, penulis mendapatkan dukungan secara mental untuk menyelesaikan proposal skripsi ini, serta tak lupa juga untuk kritik yang membangun untuk proposal skripsi ini. Penulis menyadari ada banyak sekali kekurangan dalam pengerjaan skripsi ini, namun penulis sudah semaksimal mungkin untuk menyelesaikan dan menyusun proposal skripsi ini. Terima kasih semoga proposal skripsi ini memberikan pengetahuan baru untuk pembaca.

Palembang, 12 Maret 2025

Pasha Lumbantobing

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
Abstrak.....	v
<i>Abstract</i>.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan penelitian dan Manfaat.....	10
1.3.1. Tujuan Penelitian	10
1.3.2. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Konsep Kebijakan Publik.....	12
2.1.1. Definisi Kebijakan	12
2.1.2. Konsep Kebijakan Publik.....	12
2.1.3. Proses dan Analisis Kebijakan.....	14
2.2. Mutu Lembaga Pelatihan Kerja.....	17

2.2.1. Manajemen Mutu dalam Analisis Kebijakan Mutu Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Amikom	17
2.2.2. Mutu Pelatihan Kerja	17
2.2.3. Indikator Mutu Lembaga Pelatihan Kerja	18
2.3. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	19
2.3.1. Pengertian Akreditasi	19
2.3.2. Indikator Akreditasi	20
2.3.3. Tujuan Akreditasi	24
2.3.4. Manfaat Akreditasi	24
2.4. Penelitian Terdahulu yang Relevan	25
2.5. Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian	33
3.2. Definisi Konsep	34
3.3. Fokus Penelitian	35
3.4. Sumber Data	36
3.5. Informan Peneliti	37
3.6. Teknik Pengumpulan Data	37
3.7. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Gambaran Umum Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan	42
4.1.1. Gambaran Umum	42
4.1.2. Visi dan Misi	43
4.1.3. Struktur Organisasi	45
4.2. Gambaran Umum Instansi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Amikom Palembang	46

4.2.1. Gambaran Umum.....	46
4.2.2. Visi, Misi, dan Tujuan	47
4.2.3. Struktur Organisasi	47
4.3. Informan Peneliti	48
4.4. Hasil Penelitian.....	49
4.4.1. Permasalahan Akreditasi.....	50
4.4.2. Peramalan.....	55
4.4.3. Rekomendasi.....	57
4.4.4. Monitoring	62
4.5. Pembahasan	63
4.5.1. Implementasi Peraturan di LPK Amikom Sumatera Selatan.....	63
4.5.2. Dampak Implementasi Akreditasi di LPK Amikom.....	80
4.5.3. Akreditasi sebagai Peningkatan Mutu di LPK Amikom	81
4.5.4. Rekomendasi untuk Akreditasi LPK Amikom	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1. Kesimpulan.....	86
5.2. Saran	87
5.2.1. Saran Teoritis	87
5.2.2. Saran Praktis	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data BPS 2023, Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas termasuk usia Angkatan Kerja (jiwa).....	2
Tabel 1.2 Data BPS, Tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Selatan.....	3
Tabel 1.3 Data LPK di Sumatera Selatan.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	35
Tabel 3.2 Informan Peneliti.....	37
Tabel 4.1 Identitas Diri Informan Peneliti.....	49
Tabel 4.2 Pelatihan Unit Kompetensi.....	66
Tabel 4.3 Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi.....	67
Tabel 4.4 Tabel Silabus Pelatihan Berbasis Kompetensi.....	69
Tabel 4.5 Daftar Unit Ruangan.....	74
Tabel 4.6 Tabel Lulusan Peserta Pelatihan LPK Amikom.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.....	45
Gambar 4.2 Struktur Organisasi LPK Amikom.....	48
Gambar 4.3 Portal SPA v2.....	58
Gambar 4.4 Portal Website OSS.....	61
Gambar 4.5 Proses Akreditasi LPK.....	64
Gambar 4.6 Ruangan Komputer.....	75
Gambar 4.7 Kelas Menjahit.....	76
Gambar 4.8 Visi dan Misi LPK Amikom.....	78
Gambar 4.9 Tata tertib LPK Amikom.....	78
Gambar 4.10 Jalur Evakuasi dan Apar.....	78
Gambar 4.11 Sertifikat Pelatihan Desain Grafis.....	82
Gambar 4.12 Sertifikat Pelatihan Autocad.....	82

DAFTAR SINGKATAN

LPK	: Lembaga Pelatihan Kerja
KMPI	: Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia
SKK	: Standar Kompetensi Kerja
SKKNI	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Bimbingan Skripsi	92
Lampiran 2 SK Dosen Pembimbing	94
Lampiran 3 Dokumentasi	96
Lampiran 4 Lembar Perbaikan Seminar Proposal	97
Lampiran 5 Lembar Perbaikan Ujian Skripsi	98
Lampiran 6 Hasil Turnitin	99
Lampiran 7 Surat Keterangan Pengecekan Similarity	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini menyebabkan pesatnya perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi, ekonomi, dan industri terjadi dengan pesat, yang berdampak pada perubahan kebutuhan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja di seluruh dunia. Dalam hal ini, manusia memegang peran penting dalam perkembangan teknologi dan kemajuan zaman. Menurut David Held, globalisasi merupakan kombinasi dari runtuhnya perbatasan, jaringan sosial, dan perubahan struktural di bidang ekonomi, politik, dan kehidupan sehari-hari. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses di mana ide-ide diciptakan, diusulkan ke negara lain untuk diimplementasikan, dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan dan menjadi kebijakan bersama bagi negara-negara di seluruh dunia.

Manusia sebagai tenaga kerja memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian global dan nasional. Tenaga kerja adalah individu yang menyediakan keterampilan, waktu, dan tenaga untuk berbagai kegiatan ekonomi, baik di sektor formal maupun informal. Di era globalisasi, peran manusia sebagai tenaga kerja semakin penting karena perubahan dalam teknologi, perdagangan, dan mobilitas tenaga kerja memperluas peluang dan tantangan di pasar tenaga kerja. Era globalisasi memperlihatkan bahwa organisasi tidak hanya bersaing di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat global. Kondisi ini memperlihatkan betapa pentingnya organisasi mempersiapkan sumber daya manusia mereka agar bisa bersaing dengan pesaing

global yang semakin bertumbuh. Dalam konteks ini, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu prioritas utama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan.

Era globalisasi ini, menyebabkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali sangat ketat, terutama bagi generasi muda yang baru memasuki pasar kerja. Kurangnya pengalaman kerja menjadi salah satu penyebab utama tingginya tingkat pengangguran di kalangan usia muda. Teknologi dan perubahan pasar kerja global telah menciptakan permintaan akan keterampilan khusus yang sering kali tidak diajarkan di institusi pendidikan tradisional. Akibatnya, banyak lulusan baru yang merasa sulit untuk bersaing dengan pekerja yang lebih berpengalaman, sehingga memperburuk tingkat pengangguran dalam kelompok usia ini. Selain itu, di banyak negara, globalisasi telah mendorong perusahaan untuk merelokasi operasi mereka ke tempat-tempat yang lebih menguntungkan secara ekonomi, sering kali mengurangi kesempatan kerja lokal.

Data BPS tahun 2023 menunjukkan, jumlah penduduk 15 tahun keatas termasuk tenaga kerja mencapai angka 855.506 jiwa, dari jumlah seluruh masyarakat di Palembang 1.718.440 pada tahun 2023.

Tabel 1.1 Data BPS 2023, Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas termasuk usia Angkatan Kerja (jiwa)

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Ketenagakerjaan (Jiwa)		
	Angkatan Kerja		
	2022	2023	2024
Sumatera Selatan	4.497.960	4.588.170	4.659.809

Sumber. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2024)

Kota Palembang sendiri memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan. Era globalisasi yang akan terus berjalan ini, akan membuat

dinamika pasar kerja berubah signifikan. Adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri yang terus berkembang, disertai persaingan global yang semakin ketat, menyebabkan tantangan yang berbeda di setiap kelompok usia. Salah satu dampak dari globalisasi ini adalah meningkatnya pengangguran, yang sering kali terkait erat dengan faktor usia. Untuk menghadapi tantangan ini, pelatihan kerja menjadi solusi penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Tabel 1.2 Data BPS, Tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Selatan

Jenis Kelamin	Tingkat Pengangguran (Persen)
	2024
Laki-Laki	3,75
Perempuan	4,02
Jumlah	3,86

Sumber. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2024)

Sebagai wilayah dengan jumlah usia produktif terbanyak, Palembang juga menjadi wilayah dengan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. TPT merupakan rasio jumlah pengangguran terhadap jumlah total angkatan kerja (penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan pengangguran). Dalam arti luas, dalam status negara berkembang, Indonesia memiliki beberapa masalah internal yang belum terlesaikan. Dalam hal ini, termasuk kurangnya keinginan untuk menjadi seorang pekerja.

Tingginya angka pengangguran bukan hanya disebabkan oleh perubahan perekonomian, tetapi ada beberapa hal penyebab pengangguran salah satunya, kurangnya kompetensi dalam menjadi tenaga kerja, sehingga dalam proses penerimaan sebagai seorang tenaga kerja, akan banyak yang mengalami kegagalan. Hal ini dapat diakibatkan oleh kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki

individu tersebut. Oleh karena itu, diperlukan persiapan dalam meluncurkan seorang tenaga kerja untuk menjadi seorang pekerja.

Manusia mempunyai berbagai kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman. Pengalaman tersebut terjadi karena manusia berinteraksi secara efisien dan efektif dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial manusia. Pendidikan merupakan suatu proses kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya lingkungan pendidikan yang dikenal dengan tiga pusat pendidikan: rumah, sekolah, dan Masyarakat. Prinsip yang menjadi pedoman selama ini adalah pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berakar pada nilai-nilai agama dan budaya nasional Indonesia, serta tanggap terhadap perubahan kebutuhan zaman.

Pendidikan nasional sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memerlukan kesadaran untuk menciptakan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi keagamaan dan spiritualnya merupakan upaya yang disengaja dan terencana. Pengendalian diri, budi pekerti, kecerdasan, akhlak yang tinggi, dan keterampilan yang diperlukan bagi diri sendiri, masyarakat, negara, dan bangsa.

Pendidikan nasional terdiri dari tiga subsistem utama, yaitu:

1. Pendidikan Formal: Ini adalah kegiatan yang sistematis, terstruktur, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan setara. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilakukan secara berkelanjutan.

2. Pendidikan Informal: Proses ini berlangsung sepanjang usia, di mana seseorang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan dari pengalaman hidup sehari-hari, termasuk pengaruh lingkungan seperti keluarga, tetangga, tempat kerja, permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa.
3. Pendidikan Non-Formal: Ini adalah kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem sekolah formal. Pendidikan non-formal bisa dilakukan secara mandiri atau sebagai bagian dari kegiatan yang lebih luas, dengan tujuan melayani peserta didik tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya.

Hal ini menunjukkan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dapat disebut sebagai Lembaga Pendidikan non formal. Pendidikan yang ditawarkan tentulah dalam bentuk memberikan pelatihan sesuai dengan bidang kerja yang dibutuhkan oleh Masyarakat dan dilakukan secara mandiri atau sebagai bagian dari kegiatan yang lebih luas, dengan tujuan melayani peserta didik tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya. Di tengah perubahan yang dipicu oleh globalisasi, pelatihan kerja menjadi solusi penting dalam mengurangi pengangguran di semua kelompok usia. Pelatihan kerja memungkinkan pekerja untuk memperbarui keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan industri global, memperluas pengetahuan teknologi, dan menyesuaikan diri dengan perubahan struktural dalam ekonomi global.

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) memiliki peran strategis dalam menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai di pasar kerja. Di tengah meningkatnya persaingan global dan perubahan cepat dalam teknologi serta industri, LPK dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga kualitas pendidikan dan pelatihan yang mereka tawarkan. Standar kualitas yang terjaga menjadi kunci untuk memastikan bahwa lulusan LPK dapat memenuhi kebutuhan industri serta memiliki keterampilan

yang relevan. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan standar kualitas ini, diperlukan kebijakan akreditasi yang efektif. Kebijakan akreditasi tidak hanya menjadi alat pengawasan dan pengendalian mutu, tetapi juga menjadi dorongan bagi LPK untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Tantangan dalam menjaga standar kualitas di LPK sangat kompleks, mulai dari relevansi kurikulum, keterbatasan fasilitas dan sumber daya, kualitas tenaga pengajar, hingga pembiayaan. Untuk menghadapi tantangan ini, kebijakan akreditasi menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa LPK mampu menyediakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme peningkatan mutu yang mendorong inovasi, adaptasi, dan pengembangan berkelanjutan di LPK. Dengan akreditasi yang efektif, LPK dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing di pasar global.

Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. LPK memiliki perhatian khusus dari pemerintah sehingga pendirian perusahaannya membutuhkan izin dari pemerintah. Tenaga kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah dua komponen penting dalam ekosistem ketenagakerjaan yang saling terkait erat. LPK memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional. Lembaga Pelatihan Kerja dalam hal ini disingkat LPK adalah instansi pemerintah,

badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2022, menjelaskan akreditasi adalah suatu asesmen yang independen agar lembaga pelatihan kerja dan pendidikan kejuruan memberikan layanan pendidikan dan pelatihan yang bermutu tinggi sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja (KEMNAKER). Peraturan ini sekaligus menjadi kebijakan Lembaga Pelatihan Kerja dalam memperoleh akreditasi. Lembaga pelatihan kerja harus diakreditasi untuk mengajarkan pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja yang akan memberikan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) atau kluster SKKNI dari jalur kejuruan dalam KKNi. Suatu lembaga pelatihan kerja dapat juga diakreditasi untuk memberikan pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja berdasarkan standar lainnya. Ada dua unit kompetensi yang secara langsung terkait dengan asesmen akreditasi dan suatu kluster lebih lanjut yang berisi enam unit kompetensi yang diadaptasi dari Sertifikat IV Training dan Asesmen. Dalam hal ini Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LA-LPK adalah lembaga yang bersifat independen dan ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan Akreditasi LPK. Mulai dari menyusun program akreditasi, hingga mengembangkan Kerjasama Internasional antar Lembaga Akreditasi Pelatihan Kerja.

Program Pelatihan Kerja adalah suatu rumusan tertulis yang memuat secara sistematis tentang pemaketan unit-unit kompetensi sesuai dengan area kompetensi jabatan pada area pekerjaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi. Dalam hal ini, Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Sislatkernas adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen Pelatihan Kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional.

Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, jumlah keseluruhan Lembaga Pelatihan Kerja di Sumatera Selatan mencapai 244.

Dengan jumlah LPK terakreditasi di Sumatera Selatan adalah LPK Swasta dengan jumlah 104 LPK, dan BLK dengan jumlah 10 BLK.

Tabel 1.3 Data LPK di Sumatera Selatan

No	NAMA LPK	JML	No	NAMA LPK	JML
1	Kabupaten 4 Lawang	1	10	Kabupaten Lahat	11
2	Kabupaten Oku Timur	40	11	Kabupaten OKU	11
3	Kabupaten Muara Enim	15	12	Kota Linggau	4
4	Kota Pagaralam	2	13	Kabupaten OKI	15
5	Kabupaten Muratara	1	14	Banyuasin	30
6	Kabupaten Musi Rawas	11	15	Ogan Ilir	3
7	Kabupaten Pali	2	16	MUBA	4
8	Kota Prabumulih	11	17	OKU SELATAN	5
9	Kota Palembang	77			
JUMLAH KESELURUHAN LPK SWASTA SUMSEL					244

Sumber. Data Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan (2024)

Adanya akreditasi ini menunjukkan nilai dari pelatihan yang diberikan oleh LPK memenuhi standar sesuai syarat. Dalam hal ini, LPK akan mendapat apresiasi dalam pemberian pelatihan kepada individu hingga individu tersebut mampu terjun ke dunia kerja sebagai seorang tenaga kerja.

Dalam penelitian ini, penulis memilih salah satu LPK di Kota Palembang, yaitu Lembaga Pelatihan Kerja Amikom. LPK Amikom merupakan satuan pendidikan pendidikan luar sekolah (Nonformal) yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

LPK Amikom merupakan satuan pendidikan pendidikan luar sekolah (Nonformal) yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal

untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

LPK AMIKOM berdiri dari pada tanggal 8 Agustus 2008 yang beralamat di Jl. K. H. Ahmad Dahlan No. 17 Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil. LPK AMIKOM berizinkan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Nomor 560/058/Disnaker/2016 Tanggal 21 Juli 2016 dan telah terakreditasi LA-LPK Nomor 422/LA-LPK/II/2019 tanggal 8 Februari 2019.

LPK ini merupakan LPK swasta yang sudah berdiri sejak lama, dan sudah terakreditasi. LPK AMIKOM merupakan LPK yang memberikan beberapa kursus atau pelatihan. Dari pelatihan yang diberikan, pihak LPK juga memberikan sertifikat ketika para siswa menyelesaikan pelatihan nya dengan baik dan mendapat penilaian yang baik dari instruktur. Beberapa pelatihan dan sertifikasi yang ditawarkan, antara lain, pelatihan komputer, desain grafis, batik jumputan, menjahit, otomotif, dan bahasa inggris.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana kebijakan mutu akreditasi LPK Amikom di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang akreditasi lembaga pelatihan kerja?”

1.3. Tujuan penelitian dan Manfaat

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang akreditasi lembaga pelatihan kerja sebagai kebijakan mutu akreditasi LPK Amikom di Provinsi Sumatera Selatan

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait dampak pelatihan kerja terhadap perkembangan kompetensi dan keterampilan individu dalam persiapan menjadi seorang tenaga kerja.
- Penelitian ini dapat menambah referensi dalam memahami pentingnya pelatihan kerja dalam meningkatkan skill, kemampuan, kompetensi dan peluang.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

- Penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait penerapan teori analisis kebijakan, khususnya Teori William Dunn.
- Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian serupa terkait kebijakan akreditasi

2) Bagi Perguruan Tinggi

- Mendukung pengembangan penelitian kebijakan publik yang berkualitas dan relevan .

- Memperluas mitra jejaring program studi dan meningkatkan hubungan dengan instansi pemerintah dan universitas.

3) Bagi Instansi

- Mendapatkan masukan empiris mengenai implementasi kebijakan akreditasi LPK.
- Memperoleh rekomendasi untuk perbaikan atau penyempurnaan kebijakan akreditasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A. (2022). Standar Pengelolaan Program Pendidikan Nonformal Dari Perspektif Akreditasi. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 5(1), 42–49. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v5i1.2403>

Apriliani, K. (2020). Pelaksanaan Pelatihan Kerja Di Lembaga Pelatihan Kerja Bali Aviation And Tourism Center (Batc) Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/klr.v1i1.44>

Damayanti, F., Syuroh, M., & Sandy, A. (2023). Analisis Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021. *@-Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 130–134. <https://doi.org/10.37858/publik.v3i2.374>

Dunn, W. N. (n.d.). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik William N. Dunn*.

Fatmariyanti, Y., Fauzi, A., Uin, S., Maulana, H., & Banten, I. (2023). *Journal Of Humanities And Social Studies Public Policy By William Dunn: Analysis And Implementation*. 1(1). <https://humasjournal.my.id/index.php/HJ/index>

Fika, N., Fauzi, A., Qurtubi, A., Sultan Maulana Hasanuddin Banten, U., Jendral Sudirman, J. N., Cipocok Jaya Kec Serang, P., & Serang, K. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. *Journal on Education*, 05(04), 16737–16747

Hafni Sahir, S. (2021). Metodologi Penelitian. www.penerbitbukumurah.com

Indah Prabawati, T. R., & Kurniawan, B. (2020). Analisis Kebijakan Publik. Surabaya: Unesa University Press

Kustriani, S. H. (2015). MODUL PELATIHAN Analisis Kebijakan.

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Laraga, R., & Aisah, N. (2022). Implementasi Kebijakan Akreditasi Lembaga Diklat dan Pengaruhnya Terhadap Budaya Organisasi Di Badan Diklat Provinsi Gorontalo. *JSIAP*, 1, 1–8.

Latif, M. A. (2019). *Dampak Akreditasi Terhadap Kualitas Pengelolaan Lembaga Kursus Dan Pelatihan*.

Nur Hikmatul Auliya, Ms., Helmina Andriani, G., Roushandy Asri Fardani, Ms., Jumari Ustiawaty, Mp., Evi Fatmi Utami, Ms., Dhika Juliana Sukmana, A., & Rahmatul Istiqomah, R. (2020). Penulis: Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.

Nurlaeli, N., & Kamil, M. (n.d.). Kualitas Layanan Pendidikan Lembaga Kursus Terhadap Kompetensi Lulusan Berdasar Pada Status Akreditasi Lembaga. In *Agustus 2019 Indonesian Journal Of Adult and Community Education* (Vol. 1, Issue 1).

Riyantini. (2019). *Akreditasi Sebagai Penjaminan Mutu Lembaga*. 1(2).

Savila, Y., & Zulkarnain, R. (2022). Perlakuan dan Penghargaan Pemerintah Terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Yang Sudah Terakreditasi. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/joll.5.1.5057>

Sugiyono. (2013.). *Metode Penelitian Kuantitatif*.

Suryono, I. L., Yossina Warsida, R., Maryani, Rita, & Yani, R. A. A. (2022). Efektivitas Balai Latihan Kerja Komunitas dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(1). <https://doi.org/10.47198/naker.v17i1.125>

Umami Rizqi, S., Nusantara, W., Mutu, M., Lulusan, M., Kursus dan Pelatihan, L., Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Gedung O-, L., & Lidah Wetan Sby Kode Pos, J. (2020). Penerapan Sistem Manajemen Mutu Iso 9001:2015 Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Di Lkp Magistra Utama Tuban. *Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, 04, 1–12.

Wakarmamu, T., & Si, S. M. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*.

Winardo, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Zahrudin, mun, Ismail, S., Yulianti Zakiah, Q., Program Doktorat Pendidikan Islam, P., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2021). *Policy Analysis Of Implementation Of Minimum Competency Assessment As An Effort To Improve Reading Literacy Of Students In Schools*. 12(1), 83–91. <https://doi.org/10.31764>

Sumber lain:

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
- <https://siapkerja.kemnaker.go.id/>
- <https://oss.go.id/>